

BAB II

KEBIJAKAN BARAK MILITER GUBERNUR JAWA BARAT DEDI MULYADI DALAM PEMBERITAAN KANTOR BERITA ANTARA

2.1 Profil Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat)

Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) merupakan bungsu dari sembilan bersaudara yang lahir di Subang, Jawa Barat, pada 11 April 1971. Pendidikan SD sampai SMA ditempuhnya di Kota Subang, yakni SD Sukabakti tahun 1984, SMP Kalijadi tahun 1987, dan SMA Negeri 1 Purwadadi tahun 1990. Sejak muda, Dedi dikenal sebagai sosok yang aktif dalam organisasi, khususnya ketika menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta pada tahun 1999. Di sana, anak pasangan Sahlin Ahmad Suryana dan Karsiti itu tercatat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta, sekaligus anggota senat mahasiswa, yang menjadi pintu masuknya ke dunia politik dan kepemimpinan.

2.1.1. Karier Politik

Karier politiknya dimulai saat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar pada 1999. . Selama lima tahun, Dedi selalu terpilih menjadi Ketua Komisi E di lembaga legislatif kabupaten setempat. Empat tahun kemudian, ia menjabat Wakil Bupati Purwakarta mendampingi Lily Hambali Hasan. Puncak pengaruhnya di tingkat lokal hadir ketika Dedi memenangkan Pilkada 2008 dan kembali terpilih pada 2013 sebagai Bupati Purwakarta untuk dua periode berturut-turut. Periode pertama dijalannya berpasangan Wakil Bupati Dudung B Supardi, sedangkan periode kedua dengan wakil Dadan Koswara. Selama kepemimpinannya, ia menekankan pembangunan infrastruktur, penguatan desa, dan revitalisasi budaya lokal.

Reputasi ini sejalan dengan kariernya di partai politik yang semakin menanjak, mulai level kabupaten, diawali menjabat sebagai wakil sekretaris, kemudian menjadi sekretaris dan akhirnya jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta (2004-2007.). Karier perpolitikannya kian moncer setelah didaulat secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat periode 2016–2020. Setelah cukup lama malang melintang di Partai Beringin, Dedi akhirnya memutuskan untuk pindah haluan ke Partai Gerindra sejak 2023. Langkah tersebut diambil sekaligus sebagai bentuk dukungannya terhadap Prabowo Subianto yang berencana maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 (dilansir dari Suara.com, 06/09/2025)

Selain aktivitas di pemerintahan, Dedi Mulyadi dikenal memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Melalui akun Instagram pribadinya, ia kerap menyoroti isu sosial, menampilkan kehidupan masyarakat, dan menawarkan solusi praktis atas berbagai persoalan. Popularitasnya di ruang digital menjadikannya salah satu dari sepuluh politisi paling berpengaruh di media sosial pada 2023 menurut Indonesia Indicator. Jejak panjang ini mengantarkan Dedi maju pada Pilkada Jawa Barat 2024 bersama Erwan Setiawan. Dengan visi “Jabar Istimewa”, pasangan ini berhasil meraih kemenangan besar dengan 62,22 persen suara. Pada 20 Februari 2025 Dedi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat (Inilah.com, 2025).

2.1.2. Didikan Militer

Latar belakang keluarga Dedi ternyata tidak lepas dari pengaruh militer, karena ayahnya merupakan pensiunan TNI. Sahlin Ahmad Suryana, sang ayah, berpangkat terakhir Praka (Prajurit Kepala) yang pensiun pada usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Dengan demikian, kedisiplinan tetap

dipertahankannya dalam mendidik keluarga, seperti diakui Dedi dalam salah satu tayangan di channel INEWS (4 Mei 2025) bahwa dirinya dididik secara dengan disiplin yang ketat ala militer, seperti tidur paling malam pukul 20.00 WIB, bangun tidur pukul 04.00 WIB, hingga tata cara atau adab makan yang sopan, yakni mulut tidak boleh terbuka saat mengunyah makanan.

“Saya dapat pendidikan ini lama. Jadi. ngerti etika seperti ini. Karena bapak saya pensiunan tentara. Disiplin hidup saya memang polanya disiplin tentara,” (Dedi, 2025).

Bahkan, Dedi sempat bercita-cita sejak kecil menjadi tentara dan pernah mencoba mendaftar Akademi Militer pada tahun 1990, tetapi tidak lulus karena terkendala badannya yang terlampau kurus, dengan berat hanya 47 kilogram. (Tribun Video: 2025). Setelah itu, Dedi mencoba lagi mendaftar Sekolah Calon Bintara (Secaba), tetapi lagi-lagi tidak lolos. Pengakuan itu disampaikannya saat menjalani retreat kepala daerah yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri, kemudian gubernur dan bupati/wali kota. Kedisiplinan dan didikan ala militer sudah mandarah daging di tubuh Dedi yang terlahir sebagai “anak kolong”, sebutan bagi anak-anak anggota TNI. Karena itulah, kedekatan emosional dengan dunia militer dan tempaan pendidikan ala militer di lingkungan keluarga, menjadi salah satu yang memengaruhi Dedi untuk menggagas program pendidikan barak militer bagi anak yang nakal.

2.2. Kantor Berita ANTARA

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA atau disebut juga dengan Kantor Berita ANTARA adalah kantor berita milik negara yang memiliki ikatan historis panjang dengan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berganti kepemimpinan, mulai

Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang ini berjalan Orde Reformasi, ANTARA tetap menyiarkan berita-berita untuk disampaikan kepada media massa pelanggan, maupun publik melalui portal www.antaraneews.com.

2.2.1. Sejarah singkat ANTARA

Berdirinya Kantor Berita ANTARA tidak dapat terlepas dari cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka sehingga menjadi alat perjuangan melawan penjajah. (ANTARA, 2007). ANTARA didirikan pada 13 Desember 1937, di tengah semangat perjuangan kemerdekaan yang digerakkan kaum muda. Empat tokoh pendiri yang kemudian dikenal sebagai “founding fathers” adalah Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar, dan Pandoe Kartawigoena. Sejak awal berdirinya, ANTARA menunjukkan kiprah penting dalam perjuangan bangsa, terutama ketika berhasil menyebarkan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia. Peristiwa bersejarah itu dipimpin langsung oleh Adam Malik yang mendiktekan teks dari tempat persembunyiannya, dibantu Pangulu Lubis dan rekan-rekan di redaksi agar pesan kemerdekaan dapat tersiar luas meski diawasi ketat oleh tentara Jepang.

Perjalanan kelembagaan ANTARA terus berkembang. Pada Mei 1962, melalui Keputusan Presiden Nomor 307, statusnya ditetapkan sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden. Sejak saat itu, ANTARA bertekad menjaga fungsinya sebagai penyedia informasi penting dan aktual, baik di dalam negeri maupun internasional. Transformasi besar kembali terjadi pada 18 Juli 2007, ketika ANTARA bergabung dalam lingkup Kementerian BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, dan resmi berbentuk Perum LKBN ANTARA.

Didukung jaringan teknologi modern, ANTARA kini memiliki biro di seluruh provinsi, sejumlah kabupaten/kota, serta perwakilan luar negeri di Kuala Lumpur, Beijing, dan London. Untuk memperkaya konten global, ANTARA menjalin kerja sama dengan berbagai kantor berita internasional, seperti Reuters, AFP, Kyodo, Bernama, hingga Xinhua, serta menjadi anggota aktif organisasi berita regional dan internasional seperti OANA dan ANEX. Setiap hari, rata-rata lebih dari 750 berita hasil liputan jurnalisnya dipublikasikan bersama ratusan informasi dari mitra luar negeri. Selain menyajikan berita, ANTARA juga mengembangkan layanan informasi bisnis, penyebaran siaran pers, serta pendidikan jurnalistik melalui Lembaga Pendidikan Jurnalistik ANTARA (Saat ini bernama LPA – Lembaga Pendidikan ANTARA).

Sebagai bagian dari misi sosial dan budaya, ANTARA mengelola Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA) yang menyimpan dokumentasi bersejarah sejak era perjuangan. Gedungnya di Pasar Baru, Jakarta, menjadi simbol penting karena dari tempat itulah berita Proklamasi pernah disiarkan. GFJA pun menjalin kerja sama internasional, mulai dari peminjaman koleksi foto berharga hingga restorasi arsip bersejarah. Komitmen untuk menjaga mutu juga dibuktikan melalui sertifikasi ISO 9001 yang diraih sejak 2008, menandakan transformasi manajemen yang lebih modern. Dengan semua kiprah itu, ANTARA tetap konsisten sebagai sumber berita nasional dengan jangkauan global (ANTARA News, 2025).

2.2.2. Visi Misi ANTARA

Untuk memahami arah pengembangan dan peran strategisnya sebagai kantor berita nasional, penting untuk melihat visi dan misi yang diemban oleh Media ANTARA. Adapun visi dan misi tersebut dilansir dari laman resmi ANTARANews.com.

Visi : Menjadi Kantor berita Indonesia sebagai sumber informasi dan data terpercaya, bagi publik, media, dunia usaha, serta pengambil keputusan.

Misi : 1. Memperkuat Marwah LKBN Antara sebagai kantor berita serta korporasi multi media yang modern berkelanjutan, dan menjadi barometer wawasan ekonomi-politik Indonesia.

2 Menjadi *flag carrier* jurnalisme Indonesia (Nation State PR) melalui pemberitaan yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai NKRI (3E + 1N).

3 Mengembangkan kapabilitas analitika data dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dimiliki untuk menciptakan wawasan bernilai berbasis data.

4 Menjadi HUB bagi komunitas, media pers lokal, nasional dan global serta terintegrasi dengan kanal distribusi konten berita dan PR. Berupa produk dan konvergensi multimedia.

Pada misi kedua, terdapat tambahan unsur-unsur berita yang membedakan dengan media-media lain, yakni 3E + 1N), yakni education (mendidik), enlighten (mencerahkan), dan empowering (memberdayakan), plus nasionalism (nasionalisme), sedangkan media lain biasanya mencukupkan pada 5W + 1H (what, who, where, why, when, dan how).

Artinya, ANTARA dalam memberitakan sesuatu akan berupaya untuk mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan menanamkan nilai nasionalisme, termasuk dalam pemberitaan tentang barak militer yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bagi anak-anak dengan permasalahan perilaku.

2.2.3 Historical Situatedness ANTARA

Dilansir dari *Antaranews.com*, Meidyatama Suryodiningrat, Direktur Utama Perum LKBN ANTARA periode 2016-2024, menyampaikan pernyataan penuh emosi dan kenangan saat berada di Surabaya pada 22 Mei 2023. Dalam pidatonya, ia menegaskan pentingnya menjaga ANTARA tetap menjadi bagian yang dekat dengan bangsa Indonesia. Selama 7,5 tahun (2016–2024), ia memimpin lembaga tersebut sebelum akhirnya dipercaya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rumania dan Moldova.

Sejarah mencatat bahwa ANTARA berperan besar dalam perjalanan pers nasional. Peran pers sebagaimana diketahui telah melalui tiga fase penting. Pertama, pada masa perjuangan kemerdekaan, media massa menjadi alat perlawanan terhadap penjajah, salah satunya lewat tulisan dan pidato Bung Tomo. Kedua, di era 1955–1959, pers berubah menjadi corong partai politik, seperti Suluh Indonesia untuk PNI atau Harian Abadi untuk Masyumi. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pers lebih dekat dengan kekuasaan sebelum akhirnya di era reformasi menjadi lebih terbuka dan bebas.

Sebagai kantor berita nasional yang berdiri sejak 13 Desember 1937, ANTARA telah menjadi saksi sejarah, termasuk saat menyiarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan melaporkan peristiwa heroik 10 November di Surabaya. Filosofi “kritis tapi bijak” kemudian menjadi pedoman ANTARA, khususnya di masa Orde Baru, agar mampu menyampaikan kritik tanpa menimbulkan rasa dihakimi.

Seiring perkembangan zaman, ANTARA bertransformasi menjadi BUMN sejak 2007 dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Namun, tantangan muncul dalam menjaga independensi karena adanya ketergantungan pada dana *Public Service Obligation*

(PSO) dari pemerintah. Hal ini kerap dipandang berpengaruh pada keberanian jurnalis dalam menyajikan berita yang berseberangan dengan kebijakan negara.

PSO merupakan penugasan yang diberikan pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah dalam bentuk berita. Informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui kanal yang dimiliki ANTARA maupun media massa di dalam dan luar negeri. Penugasan berupa PSO kepada ANTARA itu diberikan karena pemerintah yang dihadapkan pada kendala sebaran informasi di media massa yang mengambil sudut pandang tidak proporsional yang berakibat apapun kebijakan pemerintah selalu salah dan diinterpretasikan berbeda oleh masyarakat. Said Didu semasa menjadi Sekretaris Menteri BUMN pernah menyampaikan bahwa saat ini sulit mencari media yang menyajikan informasi dari sudut pandang yang pas dengan kepentingan pemerintah yang membuat kebijakan pemerintah tidak diterima utuh oleh masyarakat. (ANTARA, 2007).

Meski demikian, sebagai lembaga pers, ANTARA dituntut tetap netral, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik. Prinsip “kritis tapi cerdas” yang diwarisi sejak masa lalu dapat menjadi strategi agar ANTARA tetap mampu bersuara kritis, namun tetap diterima oleh semua pihak. Dengan cara itu, ANTARA bisa menjaga jati dirinya sebagai media strategis yang berpihak pada kebenaran tanpa kehilangan identitasnya (ANTARA News, 2025).

Dalam perjalanannya, ANTARA memang didorong sebagai pusat informasi kebijakan negara dan membangun citra positif negara di mata dunia. Widodo Muktiyo saat menjabat Ketua Dewan Pengawas ANTARA menyampaikan bahwa ANTARA adalah perusahaan plat merah yang sangat strategis dalam penyebaran informasi di dalam negeri.

ANTARA mempunyai sumber daya yang sangat luas sehingga mampu menyebarkan informasi terkait kebijakan negara hingga pelosok Tanah Air dengan maksimal.

“Program pemerintah tersebut akan menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. LKBN Antara memiliki fungsi mencerahkan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi saat ini,” (Widodo, 2020). Dengan sumber daya seperti ini, Widodo mengharapkan akan membuat masyarakat mengetahui secara detail apa saja kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan.

2.3. Kontroversi Kebijakan Barak Militer dari Gubernur Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa program barak militer bagi remaja bermasalah dirancang untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta mengembalikan identitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurutnya, maraknya perilaku brutal dan tindak kriminal di kalangan remaja merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara, sehingga diperlukan langkah nyata agar satu generasi tidak kehilangan nilai luhur sebagai manusia Indonesia (Bappeda Jabar, 2025).

Program ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk militerisasi, melainkan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan. Kegiatan yang diberikan mencakup olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan dan minum hingga menjauhkan peserta dari rokok serta narkoba. Keikutsertaan remaja dalam barak militer ini pun harus atas persetujuan orang tua, sementara status mereka sebagai siswa tetap dipertahankan di sekolah asal masing-masing.

Dedi menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan ikhtiar bersama untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman pergaulan bebas, penggunaan gawai yang tidak sehat,

serta persoalan gizi akibat pola makan yang tidak teratur. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, sehat, dan berdayasaing, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana (2025), menjelaskan bahwa program pembinaan bagi para remaja yang dianggap bermasalah ini diberi nama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan. Program ini digelar di dua lokasi utama, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Bandung, serta di Markas Resimen Artileri Medan 1 Kostrad, Purwakarta. Peluncurannya dilakukan serentak pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Menurut Wahyu, sasaran dari program ini adalah pelajar tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang mengalami persoalan dalam kepribadian maupun perilaku, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum.

Wahyu menekankan bahwa kegiatan tersebut bukanlah bentuk pendidikan militer, melainkan pembinaan yang menekankan pada aspek psikologis, kedisiplinan, serta penguatan mental. Materi yang diberikan relatif umum, mirip dengan pembelajaran di sekolah reguler. Peserta mendapatkan bimbingan konseling, pembekalan wawasan kebangsaan, penyuluhan mengenai bahaya narkoba, serta kegiatan yang bersifat memotivasi dan membangun solidaritas, seperti permainan kelompok, latihan baris-berbaris, hingga kegiatan outbound. Proses pembinaan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI AD, Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), hingga tenaga pendidik dari disiplin ilmu yang relevan.

Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari sorotan tajam. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan kekhawatiran. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan adanya praktik yang bersifat intimidatif, di mana beberapa anak yang menolak mengikuti program ini justru mendapat ancaman tidak naik kelas. Temuan

tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penentuan peserta masih bermasalah. Jasra menjelaskan, seleksi peserta tidak didasarkan pada asesmen psikologis dari tenaga profesional, melainkan hanya bermodal rekomendasi guru bimbingan konseling. Ironisnya, di sejumlah sekolah negeri di Purwakarta yang menjadi lokasi program, bahkan ada yang belum memiliki guru bimbingan konseling (BK) sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa yang sebenarnya memberikan rekomendasi pengiriman siswa ke program tersebut.

Lebih jauh, KPAI mencatat sekitar 6,7 persen siswa tidak memahami alasan mereka dimasukkan ke program ini, sebuah fakta yang menunjukkan lemahnya prosedur seleksi. Selain itu, sebagian besar pembina dari unsur militer dinilai belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip dasar perlindungan anak. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang menjamin aspek kesehatan dan keselamatan anak juga memperburuk catatan program ini. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa meski program yang digagas mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, dimaksudkan untuk membentuk karakter disiplin pada generasi muda, pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan mendasar, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan standar pembinaan yang layak (Tempo.co, 2025).

Pendidikan barak militer yang diberlakukan terhadap anak atau remaja tersebut juga dinilai memiliki sejumlah kelemahan yang tidak boleh diremehkan, antara lain berpotensi menekan kreativitas dan inisiatif anak karena lingkungan yang terlalu kaku dan terpusat pada perintah. Kemudian, berisiko menimbulkan tekanan mental seiring penerapan disiplin yang tinggi dan kurangnya ruang untuk berekspresi secara emosional yang bisa menyebabkan stress atau trauma pada Sebagian individu yang tidak cocok dengan model pendekatan semi militer. (Susanto, 2025).

Bahkan, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai program pendidikan militer bagi anak-anak itu berbahaya dan bisa memunculkan trauma

militerisme. Program pendidikan barak militer tidak pantas untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam menangani anak-anak yang kurang motivasi belajarnya. Jika dipaksakan, justru bisa membangunkan trauma lama soal militerisme di ruang-ruang sipil. Alih-alih menjadi solusi, pendekatan ini dikhawatirkan malah menjadi bentuk intimidasi.

Menggertak anak dengan ancaman pendekatan militer bertentangan dengan prinsip pendekatan pendidikan yang seharusnya humanis, membangun rasa aman, dan memberdayakan anak. Pelibatan militer dalam ranah pendidikan sipil pernah meninggalkan luka sejarah di masa lampau yang tidak boleh diulang. Serta, mewakili keresahan bahwa kenapa sekarang ini TNI selalu tampil seolah menjadi solusi segala permasalahan, sehingga sedikit-sedikit harus melibatkan militer. (Tempo, 2025).